



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 244/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat, perlu ditetapkan daftar informasi publik secara terbuka, efisien, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;



6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik Nomor Rekening 2.16.02.2.01.06
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Tembusan disampaikan kepadaYth :

1. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Komisi Informasi Sumatera Barat.

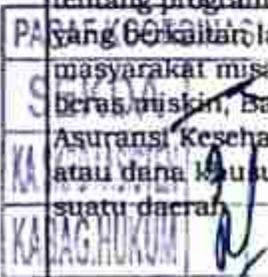
LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 244 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 2 Mei 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFI KASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Informasi tentang Profil Badan Publik	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
1	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
2	Ruang lingkup kegiatan	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
3	Visi dan misi	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
4	Maksud dan tujuan	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
5	Struktur organisasi	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
6	Gambaran umum setiap satuan kerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
7	Profil singkat pejabat struktural	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
	Nama	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-

	Nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
	Alamat unit/satuan kerja pejabat	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
	Laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannya	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
	Latar belakang pendidikan	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
	Penghargaan yang pernah diterima	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
2	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
1	Nama program dan kegiatan;	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
2	Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor Telepon dan atau alamat yang dapat di hubungi	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
3	Target dan/atau capaian program serta kegiatan	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
4	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
5	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
6	Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan dokumen anggaran lainnya	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-
7	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	v		v	Sepanjang masih berlaku	-

8	Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan dokumen anggaran lainnya	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
9	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
10	Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik misalnya : proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan, agenda dan proses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), waktu distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agenda sidang pada tiap tingkatan peradilan.	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
11	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
12	Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-



3	Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik Negara, meliputi	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
1	Pengumuman penerimaan pegawai dilingkungan Badan Publik;	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
2	Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai dilingkungan Badan Publik	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
3	Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan Pegawai	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
4	Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasi;	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
5	Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
6	Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yang diterima.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
7	Hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan pegawai yang diikutinya	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
4	Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan umum, Informasi tentang penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan, selang-kurangnya meliputi:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-

KASUBDIPROKUR
 SEKDA
 KABAG. HUKUM

1	Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasi;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
2	Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
3	Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam Setiap lembaga pendidikan;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
4	Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
5	Jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
6	Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
7	Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang diterima	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
5	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya yang sekurang-kurangnya berisi:	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-

SEKDA
 KASIKO/ASISTEN
 KABAG HUKUM

1	Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-
2	Efisiensi dana yang dicapai;	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-
3	Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun kedepan;	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-
4	Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-
5	Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait.	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-
6	Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-
7	Data statistik tentang kegiatan bila ada	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-
6	Ringkasan Laporan keuangan yang sekurang kurangnya terdiri atas :	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-
1	Neraca dan laporan realisasi Anggaran	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-
2	Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-
3	Daftar Aset dan Investasi	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√	√	Sepanjang masih berlaku	-

PARA KORDINASI
 SE
 KASIPU/ASSTEN
 KABAG.HUKUM

7	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik yang sekurang kurangnya terdiri atas :	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
1	Jumlah Permintaan informasi yang diterima	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
3	Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
4	Alasan penolakan informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
8	Informasi tentang Peraturan dan atau Keputusan yang mengikat Publik yang dikeluarkan oleh	Bagian Hukum	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
1	Daftar Rancangan dan tahap perumusan bagi Peraturan, Keputusan dan atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan	Bagian Hukum	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
2	Daftar Dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan	Bagian Hukum	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-

SEKDA
 KA SKPD / ASISTEN
 KABAG. HUKUM

3	Daftar Peraturan, Keputusan dan atau kebijakan yang telah disahkan atau di tetapkan	Bagian Hukum	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
9	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi serta tata cara menyelesaikan sengketa Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
10	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
11	Informasi tentang prosedur Peringatan Dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor dan badan Publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
12	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang /jasa Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2024	√		√	Sepanjang masih berlaku	-



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 244 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 2 MEI 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
 2024

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Informasi tentang Perda, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan Kebijakan Perangkat Daerah sekurang kurangnya terdiri atas :	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
1	Dokumen pendukung seperti Naskah Akademis, kajian, atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan dan kebijakan tersebut.	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
2	Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan keputusan atau kajian tersebut.	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
3	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan keputusan atau kebijakan tersebut	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
4	Rancangan peraturan keputusan atau kebijakan tersebut	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
5	Tahapan perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
6	Daftar Peraturan, keputusan, kebijakan yang telah diterbitkan	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2024	√		√	Selama masih berlaku	-

PADANG
 2024
 KEBAG. HUKUM

7	Seluruh informasi lengkap yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
2	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
1	Pedoman pengelolaan administrasi, personil, dan keuangan	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
2	Profil Lengkap Pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
3	Anggaran badan Publik secara umum maupun secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
4	Data statistik yang dibuat oleh badan publik	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
3	Surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tupoksinya	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
4	Informasi tentang perjanjian dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
5	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan, dan / atau tidak dikeluarkan, berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
6	Informasi tentang Juklak/Juknis, Buku Pedoman, data SKPD, SPM, SOP dan ISO	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
7	Informasi tentang kajian, Naskah Akademis dan sejenisnya yang buat oleh SKPD	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-

8	Data perbendaharaan atau inventarisasi	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
9	Rencana Strategis dan rencana kerja Badan Publik	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
10	Agenda kerja pimpinan Badan Publik	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
11	Informasi mengenai kegiatan layanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki, serta kondisinya, Sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya.	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
12	Informasi Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
13	Informasi Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
14	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
15	Daftar informasi publik lainnya yang dinyatakan terbuka berdasarkan undang-undang	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-
16	Aplikasi e-Government	Parangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√		√	Selama masih berlaku	-

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA. SKPD / ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 244 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 2 Mei 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Ancaman keamanan kesehatan masyarakat	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√			Selama berlaku	-
2	Ancaman ketertiban umum	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√			Selama berlaku	-
3	Ancaman bencana alam	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√			Selama berlaku	-
4	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√			Selama berlaku	-
5	Informasi karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√			Selama berlaku	-
6	Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan antariksa	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√			Selama berlaku	-

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 KASUBDASSTEN
 KABAG HUKUM
 71
 14

7	Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√				Selama berlaku	-
8	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√				Selama berlaku	-
9	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilita publik.	Perangkat Daerah Padang Pariaman	2024	√				Selama berlaku	-

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 244/KEP/BPP/2024
 TANGGAL 2 Mei 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR INFOMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MAMFAAT JIKA DITUTUP
	KEARSIPAN				
1	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j ;UU No.43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h ;	Sampai ada Persetujuan dari orang yang bersangkutan /pihak yang berwenang	Mengungkap Rahasia Pribadi	Melindungi data Pribadi
2	Arsip Peta Foto Udara	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d ; UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf d	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap Kekayaan Alam dan rahasia negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
3	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l ; UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf i	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
4	Arsip Dinas; aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen Keuangan, SPJ berikut lampiran-lampiran Dokumentasi anggaran dan organisasinya				
		UU.No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data Lengkap yang terlindungi Dalam proses penegakan hukum

	b	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perorangan	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	Selama masih berlangsung penyelenggaraanya	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	Melindungi hak atas Kekayaan intelektual
	c	Data Informasi pertahanan dan keamanan negara	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	Selama status Perlindungan Masih berlaku	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi Pertahanan dan keamanan negara
	d	Data kekayaan alam yang yang dilindungi	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	Pengukapan penguasaan atas sumber dungekekayaan alam yang dilindungi	Melindungi kekayaan alam yang dilindungi
	e	Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri ketahanan ekonomi	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi dan dapat meresahkan masyarakat	melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat
	f	Akta otentik yang bersifat Pribadi dan wasiat	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	melindungi kepentingan kepemilikan Pribadi
	g	Memorandum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	mengganggu proses Pelaksanaan Kegiatan	melancarkan proses Pelaksanaan Kegiatan
5		Disposisi surat pimpinan	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	selama belum ada tindak lanjut dari SKPD Pengelola Surat	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan	mengamankan proses Penyusunan Kegiatan
		BIDANG KEPENDUDUKAN				
6		Data Pribadi Penduduk	UU No. 14 tahun 2008, pasal 17 huruf a dan huruf l, UU no. 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2), dan (3)	Sampai dengan terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/bupati/Walikota/tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
		BIDANG KEPEGAWAIAN				
7		Rincian hasil Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
8		Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan peserta diklat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia Pribadi seorang PNS
9		Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/ pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia Pribadi seorang PNS
10		Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan di ungkap rahasianya	mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS

11	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan di ungkap rahasianya	mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
12	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	sampai ada keputusan tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Memperlancar proses penegakan hukum, Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
13	Data Rencana Penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Dokumen Hasil Sidang Baperjakat (notulen pertimbangan/ rekomendasi daftar nominasi/ rangking Pejabat Struktural	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
15	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara	mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	SK Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai Berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan karena adanya Pengungkapan secara Prematur	penyusunan kebijakan
17	Daftar Pejabat yang akan Dilantik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai Berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan karena adanya Pengungkapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan



18	Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses ten potensi/kompetensi PNS/pejabat	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
19	Hasil Identifikasi potensi PNS	UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Tahun i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan, dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Mengamankan proses penyusunan kebijakan, melindungi rahasia pribadi seorang PNS
20	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21	Soal Tes CPNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	sampai selesai pelaksanaan tes	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
22	Data Nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan pengumuman	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	melindungi rahasia pribadi seorang PNS, Mengamankan proses penyusunan kebijakan
23	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
24	Dokumen pengakatan, pemindahan guru PNS Dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU.No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	SK pengakatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
26	Daftar nilai DP3 PNS	UU. No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia



27	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	UU. No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
28	Keputusan ijin/keterangan tentang penceraian PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
29	Dokumen pengelolaan kepegawain:(Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, Pensun, dan administrasi kepegawain)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN					
30	Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan kemandirian negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah
31	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
32	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH PARAF KOORDINASI	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	membantu kelancaran proses penegakan hukum
33	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
34	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan KADAC HUKUM	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum

	BIDANG PEREKONOMIAN				
35	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat(3)huruf b, KIP, Pasal 6 ayat(3)huruf b	sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan
36	Rencana Alokasi bersubsidi	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat(3)huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan
37	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk kabupaten	UU No. Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
	BIDANG PEMERINTAHAN				
38	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	sampai dengan selesainya proses pelepasan tanah Kas Desa	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39	Kajian teknis penetapan lokasi dan basic Design Pengadaan dan basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	sampai terbitnya SP2LP (surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan)	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	ekonomi nasional mengamankan proses penyusunan kebijakan
40	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengalihan tanah	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan

KABUPATEN KOUKURAS
KABAG. HUKUM

41	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	dapat menghambat kesuksesan kebijakan (menggangu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	kelancaran proses tukar menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
42	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan kepala/wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai penerbitan keputusan	dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
43	Keputusan Medagri tentang peresmian Pemberhentian dan pengangkatan kepala/wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf	sampai dengan Penyerahan SK	Penyerahan SK dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
44	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Sumbar tentang Peresmian Pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/Pimpinan DPRD Padang Pariaman	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	sampai dengan penerbitan keputusan	dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
45.	Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari	UU No. 14 Tentang 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan pengecualianya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
46	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon Wali Nagari	UU No. 14 tentang 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan pengecualianya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI				
47	Berita sandi	UU No 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengukapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara



49	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
52	Jalur Komonikasi VVIP	UU No. 14 Th 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
53	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
54	Berita/Radiogram rahasia	UU No. Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				
55	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b	selama masih berlaku	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang baik sehat
56	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang, Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, kualitas Bahan Tambang, sebaran)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat(3) huruf b dan 17 huruf b daan d	Sampai dengan terpilihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mengungkapakan kekayaan alam	melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat

PARAF KOORDINASI

KABAG. HUKUM

57	Data Teknis Potensi Air Tanah	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama potensi air tanah diperkirakan	Dapat mengungkap kekayaan alam	mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
	BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
58	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
59	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
60	Hasil Test kemampuan fisik	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil test kemampuan fisik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
61	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	melindungi hak atas kekayaan intelektual
	BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN				
62	Dokumen Perijinan beserta lampirannya	UU No Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	melindungi data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia
63	Catatan Penilai Review Terhadap Riset Unggulan Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64	Data Debitur, data bergulir	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	melindungi rahasia pribadi debitur

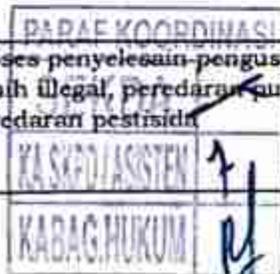
PARAF KOORDINASI

SEKDA

KASIKDASIS

KABAG. HUKUM

65	Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha Dagang Kecil Menengah UDKM)	UU No. 14 Pasal 17 huruf b	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
66	Surat keterangan Asal(SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor(API) dan dokument lainnya di bidang perdagangan luar negeri	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
	BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN				
67	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	UU No. Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama diperakan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (kordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara
68	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal loging/illegal trading yang masih dalam proses	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai dengan proses P21	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
69	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk publik	dapat mengungkap kekayaan alam indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	melindungi/menjaga kekayaan alam indonesia (aumber daya plasma nutfah)
70	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar



71	Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	UU No. 31 th 2004 tentang Perikanan UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan j UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber daya	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kekayaan alam
72	Hasil Uji Laboratorium untuk keperluan ekspor	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
73	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur
BIDANG KESEHATAN					
74	Identitas Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
75	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 47 ayat(2), UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
76	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU No. 14 th 2008 tentang UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i, UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1)	sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	melindungi rahasia pribadi pasien
77	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i, UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 44 ayat (3)	Samapi ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	melindungi rahasia pribadi pasien
78	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf c, UU No. 14 th 2008 tentang KIP, PASAL 6(3)HURUF D, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

79	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	UU No 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
80	Hasil audit terkait dengan medical error	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat(3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
81	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau sejenis	UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 33 dan 34, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 14, UU No. 36 th 2009 tentang Kesehatan, pasal 98 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
BIDANG SOSIAL, KETENAGA KERJAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
82	Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (jayandu) Widuri	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak pribadi
83	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pedampingan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi(riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik & psikis seseorang	menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitas
84	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai penerbitan keputusan	menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan
85	Hasil diagnosa/bedah kasus calon kelayan (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	melindungi rahasia pribadi calon kelayan

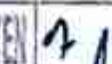
KASUB ASISTEN
KABAG. HUKUM

86	Data kelayakan UPT(Penyadang HIV/AIDS dan eks PSK)	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitas/penanganan kelayan)	melindungi rahasia pribadi kelayan
87	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengukapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan
88	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada gubernur	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penanggung upah minimum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengupan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
89	Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan (nota pemeriksaan dan BAP)	Pasal 5 UU No. 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang pengawasan perburuhan tahun 1948 NR 23 dari republik Indonesia untuk seluruh indonesia, UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha
BIDANG KOMINFO					
90	Lokasi server	UU No. 11 th 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual melindungi/ mengamankan perangkat serta data
91	Internet Protocol/IP Address private	UU No. 11 th 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	melindungi hak atas kekayaan intelektual menjaga/melindungi hak akses

PARAF KOORDINASI
 SERDAR
 KASIKO DIASISTEN
 KASIKO DIASISTEN
 KASIKO DIASISTEN

97	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan		memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (personel dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar Perda), Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
98	Berita Acara Pemeriksaan	UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, dan i	Selama proses pemeriksaan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dapat mengungkap rahasia pribadi objek diperiksa, Dapat menghambat proses kesuksesan proses penyusunan kebijakan	memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan Melindungi data-data pribadi objek diperiksa
99	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	UU No. 5 th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 1981, Pasal 70 ayat (2), UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	1 tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
BIDANG KEUANGAN					
100	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahtanganan barang daerah	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
101	Database Objek Pajak dan Retribusi	UU No. 11 th 2008 tentang ITE Pasal 40, UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan data base objek pajak dan retribusi
102	Dokument Proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan dan etika pengadaan

103	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
104	Dokumen penawaran dari Penyedia barang/jasa	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran
105	Susunan Kepanitiaian pengadaan barang/jasa melalui LPSE	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokument
106	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
107	Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	UU No. 17 th 2003 tentang keuangan negara, pasal 31 ayat(1) UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan
108	Kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN.


SUHATRI BUR